

Peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dr. Sukhemi, S.E., M.Sc.

Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA.

Prof. Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.

Dr. Mahmudi, SE., M.Si., Ak.



Penerbit Jivaloka

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dr. Sukhemi, S.E., M.Sc.

Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA.

Prof. Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.

Dr. Mahmudi, SE., M.Si., Ak.



Penerbit Jivaloka

Peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

©Jivaloka, 2025

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

All Right Reserved

Penulis

Dr. Sukhemi, S.E., M.Sc.

Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA.

Prof. Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.

Dr. Mahmudi, SE., M.Si., Ak.

Editor

Dr. Sukhemi, S.E.

Cover/Layout

Setia S Putra

Cetakan : I, September 2025

x+ 210 hlm; 15,5 x 23 cm

192-jivaloka-publishing

ISBN : 978-634-7301-14-7

E-ISBN : 978-634-7301-15-4

QRCBN : 62-3198-4065-225

Diterbitkan Oleh:



Penerbit Jivaloka Mahacipta:

“Kreativitas Tanpa Batas”

Kadipolo RT/RW 03/35. Dsn. Sendangtirto,

Kec. Berbah, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta. 55573

WhatsApp : **+6281-7410-0434**

Website : www.jivaloka.com

Facebook : [@jivalokapublishing](https://www.facebook.com/jivalokapublishing)

Instagram : [jivaloka_publishing](https://www.instagram.com/jivaloka_publishing)

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun,
termasuk foto copy, tanpa izin tertulis dari penulis

Isi bukan tanggung jawab percetakan



KATA PENGANTAR

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah setiap tahun terus meningkat, namun kualitas pengelolaan keuangannya tidak beranjak membaik. Ini terjadi, oleh sebab pengolahan data dan pelayanan berbasis teknologi informasi belum dikelola secara optimal, terjadi juga keterlambatan penyampaian laporan keuangan, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan, ketidakhematan, dan inefisiensi anggaran. Fokus utama buku ini, menyoroti perihal penerapan *e-government*, peningkatan akuntabilitas, dan kualitas pelaporan keuangan, berperan transformatif dalam mendorong kinerja keuangan.

Berbekal spektrum teori institutional isomorfisme mimetik, normatif, dan koersif, lebih lanjut buku ini, membahas spesifik dampak positif *e-government* dalam optimalisasi proses keuangan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Implementasi sistem elektronik, tidak hanya mempercepat alur kerja, tetapi juga mengurangi potensi penyimpangan dan meningkatkan akurasi data keuangan. Buku ini, bertujuan menggali pengaruh tingkat adopsi *e-government* dan kualitas pelaporan keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan akuntabilitas sebagai variabel mediasi.

Buku ini membuktikan urgensinya fungsi *e-government* melalui kebijakan internal, pelatihan, dan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan akuntabilitas, serta efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga, bisa menjadi acuan bagi pengambil kebijakan strategis, reformasi administrasi, dan layanan publik berbasis elektronik. Buku ini

merupakan panduan berharga bagi pemerintah daerah, akademisi, dan siapa saja yang berminat perihal isu-isu tata kelola keuangan publik dan reformasi birokrasi.

Yogyakarta, Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pendekatan Isomorfisme Teori Institusional dan Kritik Teori Klasik	14
C. Perihal Proses Kajian	27
D. Tentang Isi Buku	37
BAB II: KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH, AKUNTABILITAS, ADOPSI E-GOVERNMENT, DAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN.....	40
A. Memahami Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	40
B. Uraian Tentang Konsepsi Akuntabilitas.....	50
C. Deskripsi Perihal Tingkat Adopsi <i>E- Government</i>	68
BAB III: HETEROGENITAS DETERMINAN BAGI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN ANALISIS BERAGAM <i>VARIABLE</i>	78
A. Beragam Faktor Dominan Bagi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	78
B. Deskripsi Data Perihal <i>E-Government</i> , Kualitas Pelaporan Keuangan, Akuntabilitas, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	84

C. Implementasi PLS-SEM dalam Analisis Data Model Struktural	88
--	----

BAB IV: <i>E-GOVERNMENT</i> DAN AKUNTABILITAS SEBAGAI DAYA DORONG BAGI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	94
A. Kontribusi <i>E-Government</i> , Kualitas Pelaporan, dan Akuntabilitas Bagi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	94
BAB V: PENUTUP	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Implikasi Kajian dan Saran yang Dimungkinkan	125
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	131
BIBLIOGRAFI	174
BIOGRAFI PENULIS	210

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Persentase Realisasi Pendapatan	3
Gambar 1.2.	Persentase Realisasi Belanja.....	4
Gambar 1.3.	Model Kajian	30
Gambar 4.1.	Hasil Structural Equation Model dengan Metode Bootstrapping	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2.	Perbandingan Kritik Teori.....	24
Tabel 1.3.	Definisi Operasional Variabel.....	32
Tabel 3.1.	Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2018 dan 2019	81
Tabel 3.2.	Jumlah Data Dianalisis	84
Tabel 3.3.	Distribusi Frekuensi Data Tingkat Adopsi <i>E-Government</i>	85
Tabel 3.4.	Distribusi Frekuensi Data Kualitas Pelaporan Keuangan.....	86
Tabel 3.5.	Distribusi Frekuensi Data Akuntabilitas	87
Tabel 3.6.	Distribusi Frekuensi Kinerja Keuangan	87
Tabel 3.7.	Nilai <i>R-square</i>	88
Tabel 3.8.	<i>Effect Size f²</i>	89
Tabel 3.9.	Nilai <i>Q²</i> Predictive Relevance.....	90
Tabel 3.10.	<i>Effect Size q²</i> untuk Konstruk Endogen Akuntabilitas	91
Tabel 3.11.	<i>Effect Size q²</i> untuk Konstruk Endogen Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	91
Tabel 3.12.	Kriteria Model Seleksi Segmen.....	92
Tabel 4.1.	Hasil Pengujian PLS-SEM Metode <i>Bootstrapping</i>	104



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 berakibat pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Masalahnya adalah pemerintah daerah wajib menyesuaikan pemakaian anggaran dalam menanggulangi pandemi Covid-19 (Republik Indonesia, 2020b), sehingga banyak berlangsung penyesuaian dalam pemakaian anggaran yang berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah wajib meyakinkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara akuntabel dan transparan guna memastikan bahwa pemakaian anggaran dalam penanggulangan Covid-19 dilakukan secara efektif serta efisien.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2020 dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah (Mendagri, 2020). Pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) dikelompokkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang meliputi, tinggi, sedang, dan rendah. Pengukuran IPKD meliputi, peringkat baik dengan nilai A, peringkat perlu perbaikan dengan nilai B, dan peringkat sangat perlu perbaikan dengan nilai C. Indeks pengelolaan keuangan daerah diukur melalui enam dimensi meliputi, kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini badan pemeriksa

keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Pengukuran IPKD pertama kali dilakukan tahun 2018 terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran, laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2018.

Data rata-rata IKPD pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi dideskripsikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1. Nilai Rata-Rata IPKD Tahun 2019 s.d 2022

	2019	2020	2021	2022
Provinsi	49,75	54,68	58,79	64,65
Kabupaten	46,89	49,41	53,18	63,85
Kota	44,55	49,16	54,97	64,37
Nasional	46,75	49,95	54,12	64,01

Sumber: Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri (2023)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada periode 2019 sampai 2022, rata-rata IPKD menunjukkan peningkatan, baik pada provinsi, kabupaten, kota, dan nasional. Apabila memperbandingkan pencapaian IPKD pada provinsi, kabupaten, dan kota dengan pencapaian nasional, maka rata-rata nilai IPKD pemerintah provinsi lebih tinggi dari rata-rata nasional pada periode 2019-2022. Nilai rata-rata IPKD pemerintah kabupaten pada menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional pada tahun 2020 dan 2021, dan pada tahun 2019 dan 2022 lain menunjukkan nilai yang lebih tinggi. Adapun pada pemerintah Kota, pada tahun 2019 – 2020, nilai rata-rata IPKD lebih rendah dibanding dengan rata-rata nasional dan pada tahun 2021-2022 lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya fluktuasi nilai IPKD terutama pada pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.



BAB II

KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH, AKUNTABILITAS, ADOPSI E- GOVERNMENT, DAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN

A. Memahami Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja merupakan nilai masa depan dari kriteria yang ditentukan, kinerja bukan semata-mata temuan dari suatu hasil, namun merupakan perbandingan antara hasil dan tujuan (Lebas, 1995). Kinerja terdiri dari: komponen, produk, konsekuensi, dampak, dan juga dapat terkait dengan ekonomi, efisiensi, efektifitas, efektivitas biaya atau ekuitas (Wholey, 1996). Sedangkan menurut Rolstadås, (1998) kinerja merupakan hubungan kompleks yang melibatkan tujuh kriteria kinerja antara lain: efektivitas, efisiensi, kualitas, produktivitas, kualitas kerja, inovasi, dan profitabilitas. Sementara itu Ghalem et al., (2016) mendefinisikan kinerja sebagai pencapaian tujuan organisasi daripada individu, dengan sumberdaya minimum yang digunakan untuk mencapai tujuan. Kinerja adalah hasil dari upaya organisasi untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Kinerja mencakup evaluasi pencapaian hasil, efektivitas penggunaan sumber daya, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (Harun et al., 2021).

Kriteria kinerja keuangan dalam sektor publik mengarah pada ekonomis, efisiensi dan efektif (Bessire, 1999; Otley, 2001; Elena-Iuliana dan Maria, 2016). Ekonomis berarti hemat cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien berarti berdaya guna dalam penggunaan sumber daya yakni penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif yang berarti berhasil guna yakni mencapai tujuan dan sasaran.

Maurel et al., (2014) mengelompokkan model kinerja publik ke dalam dua kelompok; pertama model yang sebagian besar mengadopsi pendekatan ekonomi, terdapat tiga model teori pendukung pendekatan ekonomi terhadap kinerja, antara lain: model *public choice theory*, model NPM (Hood, 1991; 1995), dan model Pollitt dan Bouckaert, (2011). Kedua model dengan orientasi pemangku kepentingan dimana warga berpartisipasi secara langsung dalam proses penilaian dan pengukuran kinerja pemerintah. Ide ini didasarkan pada arus *Total Quality Management* (TQM), di mana pelanggan terlibat dalam menentukan keluaran dan hasil. Ini juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan modern, di mana orang diminta untuk berpartisipasi dalam kehidupan organisasi publik (Armstrong dan Armstrong, 1997; Vigoda, 2002). Model Eropa didasarkan pada pendekatan kualitas (EIPA, 2006), sementara metode lain mengadaptasi *Balanced Scorecard* Kaplan dan Norton, (1996).

Sektor publik mengadaptasi model *public choice theory* dengan mengevaluasi kinerja organisasi berdasarkan masukan, keluaran, dan dampak. Tiga komponen model 3E digabungkan dalam model ini: ekonomi dimasukkan ke dalam input, efisiensi adalah rasio output terhadap input, dan efektivitas adalah hasilnya. Hasil diukur dengan indikator non-keuangan yang menunjukkan manfaat sosial dari tindakan, sedangkan keluaran menunjukkan kegiatan yang mungkin menghasilkan jenis hasil tertentu (Maurel et al., 2014).

Pendekatan berikutnya adalah model *new public management* (NPM) yang berusaha menggabungkan perspektif internal dengan perspektif pelanggan, dan berupaya fokus pada proses dan output internal. Menurut Hood, (1995) NPM dianggap menghilangkan perbedaan antara organisasi swasta dan publik, terdapat 5 prinsip dalam kinerja organisasi publik; Pertama manajemen berdasarkan hasil, mengubah fungsi pelayan publik dari administrator menjadi manajer yang bertanggung jawab atas hasil. Kedua mengukur dampak tindakan, yang memerlukan pemahaman sebelumnya tentang tujuan dan finalitas strategis otoritas lokal, pertimbangan kontribusi mitra, dan peningkatan pertukaran informasi antara mitra. Ketiga Mengejar kepuasan klien, tindakan Administrasi benar-benar terfokus pada kepuasan pengguna. Keempat tekad untuk menetapkan keuangan publik pada pijakan yang sehat, yang memerlukan analisis biaya dan, untuk reformasi tertentu, outsourcing atau privatisasi layanan tertentu. Kelima Peningkatan akurasi dan transparansi rekening publik.

Pollitt dan Bouckaert, (2011) membuat model berikut untuk berbagai sistem manajemen kinerja publik. Di satu sisi, sistem manajemen berkonsentrasi pada dimensi internal kinerja dan dimensi eksternal. Ini berarti memikirkan masalah sosial ekonomi, menafsirkannya dalam kerangka kebutuhan, dan kemudian mengevaluasi hasil eksternal dari tindakan publik. Di sisi lain, sistem manajemen menggunakan lingkaran manajemen kinerja yang menghubungkan dimensi kinerja internal dan eksternal secara bersamaan. Akhirnya, kinerja internal dan eksternal dibagi menjadi beberapa objek kinerja. menghubungkan relevansi tujuan dengan kebutuhan, efisiensi penggunaan sumber daya dalam proses produksi, efektivitas manajemen dibandingkan dengan tujuan dan utilitas publik secara keseluruhan, hasil akhir dibandingkan dengan kebutuhan yang diidentifikasi.



BAB III

HETEROGENITAS DETERMINAN BAGI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN ANALISIS BERAGAM VARIABLE

A. Beragam Faktor Dominan Bagi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan daerah ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata Kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Mendagri, 2020). Kriteria kinerja dalam sektor publik mengarah pada ekonomis, efisiensi, dan efektif (Bessire, 1999; Otley, 2001; Elena-Iuliana dan Maria, 2016). Ekonomis berarti hemat cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien berarti berdaya guna dalam penggunaan sumber daya yakni penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif yang berarti berhasil guna yakni mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan menurut Maurel et al. (2014) kinerja sektor publik mengadopsi model *public choice theory* dalam mengevaluasi kinerja organisasi berdasarkan masukan, keluaran, dan dampak. ekonomi dimasukkan kedalam input, efisiensi adalah rasio output terhadap input, dan efektivitas adalah hasilnya. Sutopo et al., (2017) menguji kinerja pemerintah daerah berdasarkan input, proses, output, outcome, manfaat dan atau dampak, sementara Chen et al., (2019) menguji kinerja menggunakan efektif, efisien, dan akuntabilitas.

Teori institutional isomorfisme dapat digunakan untuk menjelaskan pengukuran kinerja dan akuntabilitas di sektor publik telah dilakukan oleh Goddard et al., (2016), Brusca dan Montesinos, (2016), Ahyaruddin dan Akbar, (2018a), Sofyani et al., (2018), George et al., (2020), Hersberger et al., (2020), Rana dan Hoque, (2020), menjelaskan penrapan Tingkat adopsi E-government telah dilakukan oleh Hwang dan Choi, (2017), Altayar, (2018), menjelaskan kualitas pelaporan keuangan telah dilakukan oleh Cohen et al., (2017), Mbelwa et al., (2019).

Brusca dan Montesinos, (2016) membandingkan 17 negara untuk mengetahui apakah ada konvergensi di antara mereka dan mempelajari masalah penting dalam pelaksanaan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini membandingkan perkembangan normatif di berbagai negara dengan menggunakan teori institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada konvergensi dalam praktek atau hasil, dan bahwa faktor institutional mempengaruhi pelaksanaan pelaporan kinerja. Di banyak negara, pelaporan kinerja telah diperkenalkan oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai mekanisme untuk mengontrol kegiatan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kinerja.

1. Faktor Penentu Kinerja Keuangan Berdasarkan Mekanisme Isomorfisme Mimetik

Isomorfisme mimetik dapat dilihat sebagai reaksi ketidakpastian lingkungan (Tseng & Chou, 2011). Isomorfisme mimetik merupakan respon terhadap ketidakpastian organisasi dalam mengidentifikasi tindakan terbaik (Arifin et al., 2015). Teori kelembagaan menunjukkan pentingnya isomorfisme mimetik, dimana organisasi-organisasi meniru satu sama lain ketika mereka menavigasi keputusan dalam konteks ketidakpastian atas apa yang dianggap sebagai tindakan yang sah (Barnett et al., 2021). Tekanan mimetik juga terjadi ketika

sebuah teknologi belum dipahami dengan baik (DiMaggio & Powell, 1983).

Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah dalam pemanfaatan teknologi informasi serta teknologi komunikasi guna pelayanan publik (Kementerian Sekretariat Negara, 2018). Kemajuan penerapan *E-government* di Indonesia tidak lepas dari tekanan pemerintah dan masyarakat (Sofyani et al., 2020). Masyarakat merupakan faktor penting yang mempengaruhi adopsi penerapan *E-government* di pemerintah daerah (Manoharan & Ingrams, 2018). Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap pemerintah daerah dalam tingkat adopsi *E-Government* dengan menggunakan domain kebijakan SPBE bobot 13%, tatakelola bobot 25 %, penerapan manajemen bobot 16,5%, dan layanan SPBE bobot 45,5 % (Republik Indonesia, 2020a). Nilai indeks SPBE di hitung berdasarkan penjumlahan dan penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain.

Isomorfisme mimetik terjadi ketika teknologi organisasi kurang dipahami (Perrow et al., 1977), dan ketika terdapat ketidakpastian lingkungan yang simbolik (DiMaggio & Powell, 1983), sehingga organisasi cenderung menjadikan diri mereka sebagai model yang sama seperti organisasi lain dan mendorong institusi untuk melakukan imitasi (Sofyani & Akbar, 2015). Implementasi *E-government* oleh pemerintah daerah merupakan bentuk legitimasi kualitas sumberdaya manusia dan fasilitas pelayanan berbasis teknologi yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Penerapan SPBE berangkat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penerapan *E-government*, seperti terjadinya pemborosan belanja teknologi informasi komunikasi sebagai akibat setiap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah membangun aplikasi



BAB IV

***E-GOVERNMENT* DAN AKUNTABILITAS SEBAGAI DAYA DORONG BAGI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

A. Kontribusi *E-Government*, Kualitas Pelaporan, dan Akuntabilitas Bagi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Buku ini dirumuskan berdasarkan teori institusional dan kajian riset terdahulu. Pendekatan isomorfisme teori institusional menjelaskan faktor-faktor yang menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk mengadopsi suatu kebijakan baru melalui tiga unsur, yaitu isomorfisme mimetik, isomorfisme normatif dan isomorfisme koersif. Isomorfisme mimetik dalam buku ini direpresentasikan melalui variabel tingkat adopsi *E-government*. Isomorfisme normatif direpresentasikan melalui variabel kualitas pelaporan keuangan. Isomorfisme koersif direpresentasikan melalui variabel akuntabilitas

1. Tingkat Adopsi *E-Government* dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Teori institutional menjelaskan perihal organisasi berperilaku serupa, serta menjelaskan tentang organisasi menghadapi tekanan berbentuk isomorfisme mimetik dari lingkungan eksternal (DiMaggio dan Powell, 1983). Dalam

teori institutional isomorfisme, organisasi bersaing bukan hanya untuk sumber daya dan pelanggan, tetapi juga untuk kekutan legitimasi kelembagaan, ekonomi, dan sosial. Teori institutional isomorfisme berguna bagi organisasi dimana politik dan budaya administrasi seremonial dan formal tertanam dalam lingkungan organisasi di pemerintah daerah Indonesia (Sofyani et al., 2018).

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka mencapai birokrasi dan pelayanan publik berkinerja tinggi. Sumberdaya terbatas dan teknologi baru menjadi kendala dalam tingkat adopsi *e-government*. Isomorfisme mimetik terjadi ketika sebuah teknologi belum dipahami dengan baik (DiMaggio dan Powell, 1983). Proses meniru atau mencontoh terdapat dalam penerapan *e-government* di pemerintah daerah dalam mengatasi masalah ketidakpastian. Penerapan SPBE atau *e-government* di pemerintah daerah dinilai tingkat adopsinya dengan menggunakan indeks. Semakin tinggi nilai indeks SPBE suatu pemerintah daerah menunjukkan kematangan penerapan *e-government* yang lebih baik, dan dapat meningkatkan kinerja keuangan lebih efektif dan efisien.

Pemerintah daerah menerapkan *e-government* dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat (Sutopo et al., 2017). Implementasi *e-government* dapat berupa elektronik informasi, komunikasi, transaksi, dan integrasi layanan (Wirtz dan Daiser, 2018), dalam lingkup penyelenggaraan pelayanan publik, pelayanan publik yang secara efisien menghasilkan penghematan biaya, dan dapat mengembangkan jenis layanan baru dengan biaya yang sama (Davies, 2015). Sehingga implementasi *e-government* dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pemerintah (Orelli et al., 2011).

Penelitian Chen et al. (2019) menyatakan pentingnya dukungan manajemen, tujuan bersama, dan kepercayaan antar-lembaga dalam penggunaan sistem *e-government* antar organisasi guna meningkatkan kinerja. Penerapan *E-government* yang dikembangkan pemerintah daerah di Indonesia bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, dalam penelitian ini tingkat adopsi *E-government* diukur dengan proksi antara lain kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan (Sutopo et al., 2017). Penelitian yang menghubungkan antara variabel *E-government* dan kinerja organisasi publik pernah dilakukan oleh Bhatnagar dan Singh (2010), Rana et al., (2013), Aquaro et al., (2014), Davies, (2015), Sutopo et al., (2017), Chen et al., (2019), penerapan sistem *E-government* pada organisasi publik diduga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Kualitas Pelaporan Keuangan dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas pelaporan keuangan merupakan aspek penting dalam pengambilan keputusan organisasi publik serta akuntabilitasnya kepada pemangku kepentingan yang lebih luas (Krambia-Kapardis et al., 2016). Kualitas pelaporan keuangan juga memberikan tekanan pada manajer untuk mengoperasikan organisasi publik dengan cara yang lebih efisien, dan tampaknya mempengaruhi kinerja organisasi publik (Tran et al., 2021). Manajer sektor publik menggunakan data akuntansi keuangan berkualitas tinggi untuk membantu membuat keputusan dan meningkatkan kinerja (Kroll, 2015; Kobayashi et al., 2016).

Isomorfisme normatif dihasilkan dari profesionalisasi lingkungan kelembagaan, yang mengacu pada serangkaian upaya kolektif yang dilakukan oleh para anggota profesi untuk menentukan metode dan kondisi kerja serta meligitimasi kegiatan mereka (Depoers dan Jérôme, 2020). Laporan auditor



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Studi ini menguji pengaruh tingkat adopsi *e-government* dan kualitas pelaporan keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan akuntabilitas sebagai variabel mediasi. Krisis keuangan global menyebabkan kebutuhan perbaikan kinerja entitas (Elena dan Maria, 2016), pemerintah pusat maupun masyarakat mengharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan informasi kinerja keuangan (Brusca dan Montesinos, 2016). Berdasarkan data Dirjen Keuangan Bina Keuangan daerah Kemendagri tahun 2022, realisasi pendapatan dan belanja APBD provinsi dan kabupaten/kota se-indonesia mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan APBD tahun sebelumnya. Namun demikian berdasar hasil pemeriksaan BPK semester 1 tahun 2022 terdapat temuan permasalahan berkaitan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketidakhematan, ketidak-efisienan, dan ketidakefektifan.

Tekanan akuntabilitas diperlukan dalam penggunaan sumberdaya oleh pemerintah daerah (Ahrens dan Ferry, 2021a). Pemerintah daerah wajib memastikan jika pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan serta akuntabel untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efisien serta efektif dan memberikan manfaat yang lebih baik untuk masyarakat. Pelaporan kinerja digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai mekanisme untuk mengontrol kegiatan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kinerja.

Studi ini membuktikan tingkat adopsi *e-government* pemerintah daerah di Indonesia sebagian besar pada kategori cukup baik, yaitu 167 pemerintah daerah (34,7%) di tahun 2021, dan 229 pemerintah daerah (47,9%) di tahun 2022, yang berarti bahwa; Pertama, kebijakan internal Instansi Pusat/ Pemerintah daerah sebagai landasan pelaksanaan proses tata kelola dan manajemen *e-government* telah di legalisasi, tetapi pengaturannya masih bersifat parsial atau sektoral sehingga belum mampu mendorong keterpaduan pelaksanaan proses tata kelola dan manajemen *e-government*. Kedua, proses tata kelola dan manajemen *e-government* Instansi Pemerintah Pusat/ pemerintah Daerah telah dilaksanakan dengan fungsi manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan. Namun, setiap unit kerja/perangkat daerah melaksanakan proses tata kelola dan manajemen *e-government* tersebut berdasarkan persepsi, pemahaman, dan fungsi manajemen masing-masing, tanpa panduan/pedoman yang baku. Ketiga, sistem elektronik/sistem aplikasi instansi pusat/pemerintah daerah mampu memberikan fasilitas yang bersifat interaktif (dua arah) dimana pengguna *e-government* dapat melakukan interaksi dengan sistem elektronik/sistem aplikasi dan sistem tersebut dapat memberikan respon. Sistem elektronik/sistem aplikasi memberikan fasilitas unduh/unggah informasi atau dokumen dan fasilitas pencarian informasi kepada pengguna *e-government*.

Hasil studi menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia dengan proksi hasil audit BPK menunjukkan bahwa sebagian besar mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), yaitu 443 pemerintah daerah (92,7%), yang berarti bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia menyajikan pelaporan keuangan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Studi ini membuktikan bahwa akuntabilitas pemerintah daerah di Indonesia Sebagian besar pada predikat B (baik), yaitu 275 pemerintah daerah (57,5%) pada tahun 2021, dan 286 pemerintah daerah (59,8%) pada tahun 2022, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia sudah terdapat gambaran bahwa akuntabilitas sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Hasil uji pengandaian menunjukkan bahwa tingkat adopsi *e-government* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tekanan tingkat adopsi *e-government* yang tinggi dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih baik. Tekanan mimetik terjadi pada saat penerapan *e-government*, terjadi proses meniru dalam tahapan adopsi *e-government* seperti kebijakan *e-government*, proses tatakelola *e-government*, manajemen *e-government*, proses pengembangan perangkat lunak, dan kemampuan organisasi pada suatu layanan administrasi berbasis elektronik serta layanan publik berbasis elektronik untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Tingkat adopsi *e-government* juga pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah daerah. Penerapan *e-government* merupakan alat potensial untuk meningkatkan akuntabilitas dan mencapai reformasi administrasi publik yang diinginkan (Bataineh dan Abu-Shanab, 2016).

Hasil studi menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini kemungkinan terjadi karena banyak hal, pertama BPK dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan metode sampel, dapat dimungkinkan sampel tidak sepenuhnya representif, sehingga tidak mencerminkan kondisi populasi secara akurat.

BIBLIOGRAFI

- Adeyemi, F. K., & Olarewaju, O. M. (2019). Internal Control System and Financial Accountability: an Investigation of Nigerian South-Western Public Sector. *Acta Universitatis Danubius. Oeconomica*, 15 (1), 134–150. <https://www.cceeol.com/search/article-detail?id=854041>
- Adi, K., Saputra, K., Subroto, B., Rahman, A. F., & Saraswati, E. (2021). *Financial Management Information System , Human Resource Competency And Financial Statement Accountability : A Case Study In Indonesia*. 8(5), 277–285. <https://doi.org/10.13106/Jafeb.2021.Vol8.No5.0277>
- Agung, M. (2020). The Effect of Financial Reporting Quality on Regional Governments' Performance Accountability. *Kne Social Sciences*, 2020 (2007), 694–701. <https://doi.org/10.18502/Kss.V4i6.6636>
- Agustina, N., & Setyaningrum, D. (2021). Determinants of the Quality of Local Government Financial Statements in Indonesia. *Review Of Integrative Business & Economics Research*, 9(3), 226–238.
- Ahrens, T., & Ferry, L. (2021a). Accounting and Accountability Practices in Times of Crisis: a Foucauldian Perspective on the UK Government's Response to COVID-19 for England. *Accounting, Auditing And Accountability Journal*, 34(6), 1332–1344. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-07-2020-4659>
- Ahrens, T., & Ferry, L. (2021b). Debate: What Support Should Local Government Expect From Accounting During a Sudden Crisis Such as Covid-19? *Public Money And Management*, 41(1), 12–14. <https://doi.org/10.1080/09540962.2021.1825163>

- Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2018a). Indonesian Local Government's Accountability and Performance: the Isomorphism Institutional Perspective. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 19 (1), 1–11. <https://doi.org/10.18196/Jai.190187>
- Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2018b). Indonesian Local Government's Accountability and Performance: the Isomorphism Institutional Perspective. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 19 (1). <https://doi.org/10.18196/Jai.190187>
- Al-Shbail, T., & Aman, A. (2018). E-Government and Accountability How to Mitigate the Disorders and Dysfunctions of Accountability Relationship. *Transforming Government: People, Process and Policy*. <https://doi.org/10.1108/TG-09-2017-0057>
- Alfonso Alves, C., Matias Gama, A. P., & Augusto, M. (2021). Family Influence and Firm Performance the Mediating Role of Stewardship. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 28 (2), 185–204. <https://doi.org/10.1108/JSBED-01-2019-0015>
- Aliahmadi, S. (2024). Does CEO Power Moderate the Link Between Labor Productivity and Financial Performance: Agency Theory or Stewardship Theory. *Asian Journal Of Accounting Research*, 9(1), 47–56. <https://doi.org/10.1108/AJAR-04-2022-0111>
- Alkurdi, A., Hamad, A., Thneibat, H., & Elmarzouky, M. (2021). Ownership Structure's Effect on Financial Performance: an Empirical Analysis of Jordanian Listed Firms. *Cogent Business And Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1939930>

- Alsmady, A. A. (2022). Quality of Financial Reporting, External Audit, Earnings Power and Companies Performance: The Case Of Gulf Corporate Council Countries. *Research In Globalization*, 5(August), 100093. <https://doi.org/10.1016/J.Resglo.2022.100093>
- Altayar, M. S. (2018). Motivations for Open Data Adoption: an Institutional Theory Perspective. *Government Information Quarterly*, 35(4), 633–643. <https://doi.org/10.1016/J.Giq.2018.09.006>
- Andreus, M., Rinaldi, L., Pesci, C., & Girardi, A. (2021). Accountability in Times of Exception: an Exploratory Study of Account-Giving Practices During The Early Stages Of The COVID-19 Pandemic In Italy. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 33(4), 447–467. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-06-2020-0091>
- Anggraini, D., Heriningsih, S., & Windyastuti, W. (2021). The Influence of Accountability, Transparency and Supervision on Budgeting Performance With The Concept of Value for Money in Village Owned Enterprises in Klaten Regency. *Journal of International Conference Proceedings*, 4(3), 704–713.
- Aquaro, V., Armstrong, E., Kwok, W. M., Spearing, P., Alberti, A., Hafeez, S., & Haataja, A. (2014). *United Nations E-Government Survey 2014: E-Government For The Future We Want*. <https://doi.org/978-92-1-123198-4>
- Aramide, S. F., Mustapha, &, & Bashir, M. (2015). The Effectiveness Of Internal Control System And Financial Accountability At Local Government Level In Nigeria. *International Journal Of Research In Business Management*, 3(8), 2321–2886.

- Arif, S. R., Febianti, F., Kusdinar, R., Nurwan, T. M., & Nugraha, D. S. (2019). Penerapan E-Government Sebagai Wujud Inovasi Pelayanan Publik. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 3, 1–6.
- Arifin, J., Tower, G., & Porter, S. (2015). Financial Reporting Compliance In Indonesian Local Governments: Mimetic Pressure Dominates. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(1), 68–84. <https://doi.org/10.20885/Jaai.Vol19.Iss1.Art6>
- Armstrong, J., & Armstrong, J. L. (1997). *Intendance Et Fonction Publique*.
- Arwati, D., & Latif, D. V. (2021). E Government And Public Satisfaction Of Bandung City Government Accountability. *Turkish Journal Of Computer And Mathematics Education*, 12(8), 501–504.
- Atmadja, A. T., Dharmawan, N. A. S., & Saputra, K. A. K. (2024). Determinants Of Factors That Affect Accounting Fraud In Local Government Financial Management. *Australasian Accounting, Business And Finance Journal*, 18(1), 148–160. <https://doi.org/10.14453/Aabfj.V18i1.09>
- Aulia, A., Febriyanti, F., & Umi, L. P. (2023). Trend Analysis Of ESG Disclosure On Green Finance Performance In Indonesia, Malaysia & Singapore Exchanges. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 79–98. <https://doi.org/10.30656/Jak.V10i1.5439>
- Aziz, M. A. A., Rahman, H. A., Alam, M. M., & Said, J. (2015). Enhancement Of The Accountability Of Public Sectors Through Integrity System, Internal Control System, And Leadership Practices: A Review Study. *Procedia Economics And Finance*, 28 (April), 163–169. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01096-5](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01096-5)

- Barnett, W. P., Xiao, X., & Zhou, Y. (2021). Competitive Exclusion Versus Mimetic Isomorphism: An Identified Empirical Test. *Sociological Science*, 8, 211–229. <https://doi.org/10.15195/V8.A11>
- Barrutia, J. M., & Echebarria, C. (2015). Resource-Based View Of Sustainability Engagement. *Global Environmental Change*, 34, 70–82. <https://doi.org/10.1016/J.Gloenvcha.2015.06.009>
- Bastida, F., Bracci, E., & Hoque, Z. (2022). Accounting For Unstable Environments In The Public Sector: Managing Post-COVID-19 Times. *Journal Of Public Budgeting, Accounting And Financial Management*, 34(1), 1–26. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-09-2021-0136>
- Bataineh, L., & Abu-Shanab, E. (2016). “How Perceptions Of E-Participation Levels Influence The Intention To Use E-Government Websites.” *Transforming Government : People, Process And Policy*, 10(2), 315–334.
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2011). *Promoting Transparency And Accountability Through Icts, Social Media, And Collaborative E-Government*. 78–91. <https://doi.org/10.1108/17506161211214831>
- Bessire, D. (1999). Dértair La Perftrmance. *Comptabilité Contrôle Audit*, 127–150.
- Bhatnagar, S. C., & Singh, N. (2010). Assessing The Impact Of E-Government: E-Study Of Projects In India. *Information Technologies & International Development*, 6(2), 109–127. <https://doi.org/10.1097/01.RVI.0000109395.74740.1F>

- Bosse, D. A., & Phillips, R. A. (2016). Agency Theory And Bounded Self-Interest. *Academy Of Management Review*, 41(2), 276–297. <https://doi.org/10.5465/Amr.2013.0420>
- Bovens, M. (2007a). Analysing And Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199465330.003.0009>
- Bovens, M. (2007b). New Forms Of Accountability And EU-Governance. *Comparative European Politics*, 5(1), 104–120. <https://doi.org/10.1057/Palgrave.Cep.6110101>
- Boxenbaum, E., & Jonsson, S. (2012). Isomorphism, Diffusion, And Decoupling. *The SAGE Handbook Of Organizational Institutionalism*, January 2008, 78–98. <https://doi.org/10.4135/9781849200387.N3>
- Braga, M. V. De A., Caldeira, D. M., & Sabença, S. Z. (2020). Innovation In Accountability In The Fight Against COVID-19 In Brazil: An Empirical Analysis Of Internal Control. *Revista Da CGU*, 12(22), 317–329.
- Brusca, I., & Montesinos, V. (2016). Implementing Performance Reporting In Local Government: A Cross-Country Comparison. *Public Performance And Management Review*, 39 (3), 506-534. <https://doi.org/10.1080/15309576.2015.1137768>
- Burdon, W. M., & Sorour, M. K. (2020). Institutional Theory And Evolution Of ‘A Legitimate’ Compliance Culture: The Case Of The UK Financial Service Sector. In *Journal Of Business Ethics* (Vol. 162, Issue 1). Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/S10551-018-3981-4>

- Cahyadi, A. (2003). E-Government: Suatu Tinjauan Konsep Dan Permasalahan. *The Winners*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.21512/Tw.V4i1.3796>
- Canello, J. (2022). Mimetic Isomorphism, Offshore Outsourcing, And Backshoring Decisions Among Micro And Small Enterprises. *Regional Studies*, 56(5), 719–736. <https://doi.org/10.1080/00343404.2021.1937596>
- Carungu, J., Di Pietra, R., & Molinari, M. (2020). Mandatory Vs Voluntary Exercise On Non-Financial Reporting: Does A Normative/Coercive Isomorphism Facilitate An Increase In Quality? *Meditari Accountancy Research*, 29(3), 449–476. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-08-2019-0540>
- Carungu, J., Di Pietra, R., & Molinari, M. (2021). The Impact Of A Humanitarian Disaster On The Working Approach Of Accountants: A Study Of Contingent Effects. *Accounting, Auditing And Accountability Journal*, 34(6), 1388–1403. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2020-4789>
- Casillas, J. C., Moreno, A. M., Acedo, F. J., Gallego, M. A., & Ramos, E. (2009). An Integrative Model Of The Role Of Knowledge In The Internationalization Process. *Journal Of World Business*, 44(3), 311–322. <https://doi.org/10.1016/J.Jwb.2008.08.001>
- Chen, Liu, X. Z., & Fu, J. T. (2010). Probable Influence Of E-Government On Financial Accountability In China. *Proceedings Of The International Conference On E-Business And E-Government, ICEE 2010*, 501–503. <https://doi.org/10.1109/ICEE.2010.134>

- Chen, Y. C., Hu, L. T., Tseng, K. C., Juang, W. J., & Chang, C. K. (2019). Cross-Boundary E-Government Systems: Determinants Of Performance. *Government Information Quarterly*, 36(3), 449–459. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.02.001>
- Chen, Y. N., Chen, H. M., Huang, W., & Ching, R. K. H. (2006). E-Government Strategies In Developed And Developing Countries: An Implementation Framework And Case Study. *Journal Of Global Information Management*, 14(1), 23–46. <https://doi.org/10.4018/978-1-60566-116-2.ch020>
- Christensen, T., & Lægreid, P. (2015). Performance And Accountability—A Theoretical Discussion And An Empirical Assessment. *Public Organization Review*, 15(2), 207–225. <https://doi.org/10.1007/s11115-013-0267-2>
- Coelho, R., Jayantilal, S., & Ferreira, J. J. (2023). The Impact Of Social Responsibility On Corporate Financial Performance: A Systematic Literature Review. *Corporate Social Responsibility And Environmental Management*, 30(4), 1535–1560. <https://doi.org/10.1002/csr.2446>
- Cohen, S., Sotirios, & Karatzimas. (2017). *Accounting Information Quality And Decision-Usefulness Of Governmental Financial Reporting: Moving From Cash To Modified C.*
- Connelly, B. L., Certo, S. T., Ireland, R. D., & Reutzel, C. R. (2011). Signaling Theory: A Review And Assessment. *Journal Of Management*, 37(1), 39–67. <https://doi.org/10.1177/0149206310388419>
- Davies, R. (2015). *Egovernment: Using Technology To Improve Public Services And Democratic Participation.*

- Davis, J. H., Schoorman, D. F., & Donaldson, L. (1997). Toward A Stewardship Theory Of Management. *Academy Of Management Review*, 22(1), 20–47.
- Defitri, S. Y., Bahari, A., Handra, H., & Febrianto, R. (2020). Determinant Factors Of E-Government Implementation And Public Accountability: Toe Framework Approach. *Public Policy And Administration*, 19(4), 37–51. <https://doi.org/10.13165/VPA-20-19-4-03>
- Depoers, F., & Jérôme, T. (2020). Coercive, Normative, And Mimetic Isomorphisms As Drivers Of Corporate Tax Disclosure: The Case Of The Tax Reconciliation. *Journal Of Applied Accounting Research*, 21(1), 90–105. <https://doi.org/10.1108/JAAR-04-2018-0048>
- Dewi. (2019). *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. 8(1), 95–108. <https://doi.org/10.25105/Jat.V8i1.8718>
- Dewi, N. F., Ferdous Azam, S. M., & Yusoff, S. K. M. (2019). Factors Influencing The Information Quality Of Local Government Financial Statement And Financial Accountability. *Management Science Letters*, 9(9), 1373–1384. <https://doi.org/10.5267/J.Msl.2019.5.013>
- Diansari, R. E., Musah, A. A., & Binti Othman, J. (2023). Factors Affecting Village Fund Management Accountability In Indonesia: The Moderating Role Of Prosocial Behaviour. *Cogent Business And Management*, 10(2), 1–26. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2219424>
- Dimaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism In Organizational Fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.

- Din, S. U., Arshad Khan, M., Khan, M. J., & Khan, M. Y. (2022). Ownership Structure And Corporate Financial Performance In An Emerging Market: A Dynamic Panel Data Analysis. *International Journal Of Emerging Markets*, 17(8), 1973–1997. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-03-2019-0220>
- Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. (2023). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2022*. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
- Dmytriiev, S. D., Freeman, R. E., & Hörisch, J. (2021). The Relationship Between Stakeholder Theory And Corporate Social Responsibility: Differences, Similarities, And Implications For Social Issues In Management. *Journal Of Management Studies*, 58(6), 1441–1470. <https://doi.org/10.1111/Joms.12684>
- Duarte, P. A. O., & Raposo, M. L. B. (2010). A PLS Model To Study Brand Preference: An Application To The Mobile Phone Market. In V. E. Vinzi, W. W. Chin, J. Henseler, & H. Wang (Eds.), *Handbook Of Partial Least Squares: Concepts, Methods And Applications*. Springer.
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Pusaka Almaida.
- Elena-Iuliana, I., & Maria, C. (2016). Organizational Performance – A Concept That Self-Seeks To Find Itself. *Annals - Economy Series, Constantin Brancusi University, Faculty Of Economics*, 4(4), 179–183.
- Ellwood, S. (1993). Parish And Town Councils: Financial Accountability And Management. *Local Government Studies*, 19(3), 368–386. <https://doi.org/10.1080/03003939308433687>

- Ferry, L., & Sandford, M. (2022). Developing “Place Leadership” When Hierarchical Accountability Is Omnipresent: The Case Of English Sub-National Government. *Journal Of Public Budgeting, Accounting And Financial Management*, 34(4), 557–565. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-06-2021-0094>
- Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. In *Cambridge University Press*. Cambridge University Press.
- Frumkin, P., & Galaskiewicz, J. (2004). Institutional Isomorphism And Public Sector Organizations. *Journal Of Public Administration Research And Theory*, 14(3), 283–307. <https://doi.org/10.1093/jopart/muh028>
- George, B., Baekgaard, M., Decramer, A., Audenaert, M., & Goeminne, S. (2020). Institutional Isomorphism, Negativity Bias And Performance Information Use By Politicians: A Survey Experiment. *Public Administration*, 98(1), 14–28. <https://doi.org/10.1111/padm.12390>
- Ghalem, Â., Okar, C., Chroqui, R., & Semma, E. (2016). *Performance : A Concept To Define ! La Performance : Un Concept À Définir ! May*, 1–12. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24800.28165>
- Ghozali, I. (2021). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program Smartpls 3.2.9 Untuk Penelitian Empiris*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Goddard, A., Assad, M., Issa, S., Malagila, J., & Mkasiwa, T. A. (2016). The Two Publics And Institutional Theory – A Study Of Public Sector Accounting In Tanzania. *Critical Perspectives On Accounting*, 40, 8–25. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2015.02.002>

- Hafizi, R., & Amalia, F. A. (2022). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 5(2), 116–130. <https://doi.org/10.18196/Jati.V5i2.14194>
- Hair, J. F., Hult, G., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2017). A Primer On Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). In *Sage Publication*. The United States Of America.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2014). *A Primer On Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. Sage Publication, Inc.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2021). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R*. Springer.
- Han, Y., & Hong, S. (2019). The Impact Of Accountability On Organizational Performance In The U.S. Federal Government: The Moderating Role Of Autonomy. *Review Of Public Personnel Administration*, 39(1), 3–23. <https://doi.org/10.1177/0734371X16682816>
- Handayani, D., Yudianto, I., & Afiah, N. N. (2020). The Influence Of Internal Control System, Information Technology Utilization, And Organizational Commitment On Government Accountability Performance. *Journal Of Accounting Auditing And Business*, 3(2), 17. <https://doi.org/10.24198/Jaab.V3i2.26120>
- Hardiningsih, P., Semarang, U. S., Udin, U., Yogyakarta, U. M., Masdjojo, G. N., Semarang, U. S., Srimindarti, C., & Semarang, U. S. (2020). Does Competency, Commitment, And Internal Control Influence Accountability? Does Competency, Commitment, And Internal Control Influence Accountability? 7(June). <https://doi.org/10.13106/Jafeb.2020.Vol7.No4.223>

- Harun, H., Graham, P., Kamase, H. P., & Mir, M. (2021). A Critical Analysis Of The Impacts Of Financial Literacy And NPM On Village Funds Initiative In Indonesia. *International Journal Of Public Administration*, 44(4), 336–345. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1722165>
- He, C., Jia, F., Wang, L., Chen, L., & Fernandes, K. (2023). The Impact Of CSR Decoupling On Financial Performance: The Role Of Customer Structure And Operational Slack. *International Journal Of Operations & Production*, 43(12), 1859–1890. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJOPM-08-2022-0521>
- Hendratni, H., Mulyadi, J., & Widiastuti, T. (2017). Pengaruh Transparansi Dan Komitmen Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 3(2), 76–93. <https://doi.org/10.34204/Jiafe.V3i2.767>
- Herold, D. M. (2018). Demystifying The Link Between Institutional Theory And Stakeholder Theory In Sustainability Reporting. *Economics, Management And Sustainability*, 3(2), 6–19. <https://doi.org/10.14254/Jems.2018.3-2.1>
- Hersberger, S. E., Stuhlinger, S., & Schnurbein, G. Von. (2020). Institutional Isomorphism And Nonprofit Managerialism: For Better Or Worse? *Nonprofit Management And Leadership*, 1–20.
- Hoai, T. T., Hung, B. Q., & Nguyen, N. P. (2022). The Impact Of Internal Control Systems On The Intensity Of Innovation And Organizational Performance Of Public Sector Organizations In Vietnam: The Moderating Role Of Transformational Leadership. *Heliyon*, 8(2), E08954. <https://doi.org/10.1016/J.Heliyon.2022.E08954>

- Hood, C. (1991). All Seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19. [Http://Dx.Doi.Org/10.1111/J.1467-9299.1991.Tb00779.X](http://Dx.Doi.Org/10.1111/J.1467-9299.1991.Tb00779.X)
- Hood, C. (1995). Contemporary Public Management: A New Global Paradigm? *Public Policy And Administration*, 104–117. [Https://Doi.Org/10.1093/0198297653.003.0009](https://Doi.Org/10.1093/0198297653.003.0009)
- Huit, G. T. M., Hair, J. F., Proksch, D., Sarstedt, M., Pinkwart, A., & Ringle, C. M. (2018). Addressing Endogeneity In International Marketing Applications Of Partial Least Squares Structural Equation Modeling. *Journal Of International Marketing*, 26(3), 1–21. [Https://Doi.Org/10.1509/Jim.17.0151](https://Doi.Org/10.1509/Jim.17.0151)
- Hwang, K., & Choi, M. (2017). Effects Of Innovation-Supportive Culture And Organizational Citizenship Behavior On E-Government Information System Security Stemming From Mimetic Isomorphism. *Government Information Quarterly*, 34(2), 183–198. [Https://Doi.Org/10.1016/J.Giq.2017.02.001](https://Doi.Org/10.1016/J.Giq.2017.02.001)
- Imbaruddin, A. (2016). *Birokrasi Akuntabilitas Kinerja (Sebuah Refleksi)*. De La Macca.
- Jachi, M., & Yona, L. (2019). The Impact Of Independence Of Internal Audit Function On Transparency And Accountability Case Of Zimbabwe Local Authorities. *Research Journal Of Finance And Accounting*, 10(5), 64–77. [Https://Doi.Org/10.7176/RJFA](https://Doi.Org/10.7176/RJFA)
- Javed, M., Rashid, M. A., Hussain, G., & Ali, H. Y. (2020). The Effects Of Corporate Social Responsibility On Corporate Reputation And Firm Financial Performance: Moderating Role Of Responsible Leadership. *Corporate Social Responsibility And Environmental Management*, 27(3), 1395–1409. [Https://Doi.Org/10.1002/Csr.1892](https://Doi.Org/10.1002/Csr.1892)

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). 'Theory Of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs And Ownership Structure.' *Journal Of Financial Economics*, 4, 305–360. [Http://Ssrn.Com/Abstract= 94043](http://Ssrn.Com/Abstract=94043)Electronic copyavailableat:[Http://Ssrn.Com/Abstract=94043](http://Ssrn.Com/Abstract=94043)<http://Hupress.Harvard.Edu/Catalog/JENTHF.Html>
- Jeriansyah, W., & Mappanyukki, R. (2020). The Effect Of Accountability And Transparency Of Regional Financial Management On Local Government Performance. *International Journal Of Asian Social Science*, 10(12), 721–729. [Https://Doi.Org/10.18488/Journal.1.2020.1012.721.729](https://Doi.Org/10.18488/Journal.1.2020.1012.721.729)
- Kalimullah, N. A., Alam, K., & Nour, M. (2012). New Public Management: Emergence And Principles. *BUP Journal*, 1(1), 1–22.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). Focusing Your Organization On Strategy—With The Balanced Scorecard, 2nd Edition. *Harvard Business Review*, January-February, 35–61.
- Karbhari, Y., Alam, M. K., & Rahman, M. M. (2020). Relevance Of The Application Of Institutional Theory In Shariah Governance Of Islamic Banks. *PSU Research Review*, 5(1), 1–15. [Https://Doi.Org/10.1108/PRR-05-2020-0015](https://Doi.Org/10.1108/PRR-05-2020-0015)
- Karyatni, N. M. D., & Handajani, L. (2020). The Quality Of Financial Statements Antecedents And Consequences Towards Financial Accountability. *International Journal Of Social Science And Business*, 4(3), 352–362. [Https://Doi.Org/10.23887/Ijssb.V4i3.26596](https://Doi.Org/10.23887/Ijssb.V4i3.26596)

- Keerasuntonpong, P., & Cordery, C. (2018). How Might Normative And Mimetic Pressures Improve Local Government Service Performance Reporting? *Accounting And Finance*, 58(4), 1169–1200. <https://doi.org/10.1111/Acfi.12252>
- Kemenpanrb. (2018). Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021. *Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021*, 151(2), 10–17.
- Kementerian Sekretariat Negara. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 110.
- Kewo, C. L. (2017). The Influence Of Internal Control Implementation And Managerial Performance On Financial Accountability Local Government In Indonesia. *International Journal Of Economics And Financial Issues*, 7(1), 293–297.
- Kobayashi, M., Yamamoto, K., & Ishikawa, K. (2016). The Usefulness Of Accrual Information In Non-Mandatory Environments: The Case Of Japanese Local Government. *Australian Accounting Review*, 26(2), 153–161. <https://doi.org/10.1111/Auar.12093>
- Komutputipong, N., & Keerasuntonpong, P. (2019). Accountability Perception Of Thai Government: To Whom And What Counts. *Journal Of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 31(1), 45–65.
- Kosadi, F., & Fadela, M. S. (2016). Pengaruh Penerapan Electronic Government Dan Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Bandung Timur. *Jurnal Indonesia Membangun*, 1, 62–77.

- Krambia-Kapardis, M., Clark, C., & Zopiatlis, A. (2016). Satisfaction Gap In Public Sector Financial Reporting. *Journal Of Accounting In Emerging Economies*, 6(3), 232–253. <https://doi.org/10.1108/JAEE-08-2013-0040>
- Kroll, A. (2015). Explaining The Use Of Performance Information By Public Managers: A Planned-Behavior Approach. *American Review Of Public Administration*, 45(2), 201–215. <https://doi.org/10.1177/0275074013486180>
- Kurnia, P., Darlis, E., & Putraa, A. A. (2020). Carbon Emission Disclosure, Good Corporate Governance, Financial Performance, And Firm Value. *Journal Of Asian Finance, Economics And Business*, 7(12), 223–231. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO12.223>
- Kyere, M., & Ausloos, M. (2021). Corporate Governance And Firms Financial Performance In The United Kingdom. *International Journal Of Finance And Economics*, 26(2), 1871–1885. <https://doi.org/10.1002/Ijfe.1883>
- Laguecir, A., Kern, A., & Kharoubi, C. (2020). Management Accounting Systems In Institutional Complexity: Hysteresis And Boundaries Of Practices In Social Housing. *Management Accounting Research*, 49. <https://doi.org/10.1016/J.Mar.2020.100715>
- Lassou, P. J. C. (2017). State Of Government Accounting In Ghana And Benin: A “Tentative” Account. *Journal Of Accounting In Emerging Economies*, 7(4), 486–506. <https://doi.org/10.1108/JAEE-11-2016-0101>
- Lebas, M. J. (1995). Production Economics Performance Measurement And Performance Management ". *Innovation*, 41, 23–35.

- Lee, M. T., Raschke, R. L., & Krishen, A. S. (2022). Signaling Green! Firm ESG Signals In An Interconnected Environment That Promote Brand Valuation. *Journal Of Business Research*, 138(August 2021), 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.08.061>
- Leoni, G., Lai, A., Stacchezzini, R., Steccolini, I., Brammer, S., Linnenluecke, M., & Demirag, I. (2021). Accounting, Management And Accountability In Times Of Crisis: Lessons From The COVID-19 Pandemic. *Accounting, Auditing And Accountability Journal*, 34(6), 1305–1319. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-05-2021-5279>
- Levesque, M., Minniti, M., & Shepherd, D. (2009). Entrepreneurs Decisions On Timing Of Entry : Learning From Participation And From The Experiences Of Other. *Entrepreneurship Theory And Practice*, 33(2), 547–570. <https://doi.org/10.1111/J.1540-6520.2009.00303.X>
- Li, W., Li, W., Seppänen, V., & Koivumäki, T. (2023). Effects Of Greenwashing On Financial Performance: Moderation Through Local Environmental Regulation And Media Coverage. *Business Strategy And The Environment*, 32(1), 820–841. <https://doi.org/10.1002/Bse.3177>
- Lindquist, E. A., & Huse, I. (2017). *Accountability And Monitoring Government In The Digital Era: Promise , Realism And Research For Digital-Era Governance*. 60(4), 627–656. <https://doi.org/10.1111/Capa.12243>
- Liu, Y., Wang, N., & Zhao, J. (2018). Relationships Between Isomorphic Pressures And Carbon Management Imitation Behavior Of Firms. *Resources, Conservation And Recycling*, 138(July 2017), 24–31. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.06.025>

- Lourenco, P. R., Piotrowski, S., & Ingram, A. (2017). Open Data Driven Public Accountability. *Transforming Government: People, Process And Policy*, 11(1).
- Mack, J., & Ryan, C. (2006). Reflections On The Theoretical Underpinnings Of The General-Purpose Financial Reports Of Australian Government Departments. *Accounting, Auditing And Accountability Journal*, 19(4), 592–612. <https://doi.org/10.1108/09513570610679146>
- Mackinnon, D. P., Fairchild, A. J., & Fritz, M. S. (2007). Mediation Analysis. *Annual Review Of Psychology*, 58, 593–614. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.58.110405.085542>
- Madi, H. (2022). The Board Of Directors And Firm Performance: Evidence From Palestinian Listed Firms. *Research Journal Of Finance And Accounting*, 13(12), 25–34. <https://doi.org/10.7176/Rjfa/13-12-04>
- Mahmudah, H., & Riyanto, B. (2017). Keefektifan Audit Internal Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 20(1), 33–54. <https://doi.org/10.24912/Ja.V20i1.74>
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.
- Manoharan, A. P., & Ingrams, A. (2018). Conceptualizing E-Government From Local Government Perspectives. *State And Local Government Review*, 50(1), 56–66. <https://doi.org/10.1177/0160323x18763964>
- Marquis, C., Toffel, M. W., & Zhou, Y. (2016). Scrutiny, Norms, And Selective Disclosure: A Global Study Of Greenwashing. *Organization Science*, 27(2), 483–504. <https://doi.org/10.1287/Orsc.2015.1039>

- Martin, J., & Spano, A. (2015). From Performance Management To Strategic Local Government Leadership: Lessons From Different Cultural Settings. *Public Money And Management*, 35(4), 303–310. <https://doi.org/10.1080/09540962.2015.1047276>
- Maurel, C., Carassus, D., Favoreu, C., & Gardey, D. (2014). Characterization And Definition Of Public Performance: An Application To Local Government Authorities. *Gestion Et Management Public, Volume 2/N(1)*, 23–44. <https://doi.org/10.3917/Gmp.023.0023>
- Mbelwa, L. H., Adhikari, P., & Shahadat, K. (2019). Investigation Of The Institutional And Decision-Usefulness Factors In The Implementation Of Accrual Accounting Reforms In The Public Sector Of Tanzania. *Journal Of Accounting In Emerging Economies*, 9(3), 335–365. <https://doi.org/10.1108/JAEE-01-2018-0005>
- Mendagri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah* (P. 3).
- Meyer, J., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure As Myth And Ceremony (Translated By Igor Chirikov). *American Journal Of Economic Sociology*, 83(2), 340–363. <https://doi.org/10.1086/226550>
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure As Myth And Ceremony Published By: The University Of Chicago Press Linked References Are Available On JSTOR For This Article: You May Need To Log In To JSTOR To Access The Linked References. Institutio. *The American Journal Of Sociology*, 83(2), 340–363.

- Mills, D. E., Bradley, L., & Keast, R. (2021). NPG And Stewardship Theory: Remedies For NPM Privatization Prescriptions. *Public Management Review*, 23(4), 501–522. <https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1695883>
- Mio, C., Fasan, M., Marcon, C., & Panfilo, S. (2020). The Predictive Ability Of Legitimacy And Agency Theory After The Implementation Of The EU Directive On Non-Financial Information. *Corporate Social Responsibility And Environmental Management*, 27(6), 2465–2476. <https://doi.org/10.1002/Csr.1968>
- Miqdad, M., & Oktaviani, S. A. (2021). The Contribution Of Social Media Value To A Company's Financial Performance: Empirical Evidence From Indonesia. *Journal Of Asian Finance, Economics And Business*, 8(1), 305–315. <https://doi.org/10.13106/Jafeb.2021.Vol8.No1.305>
- Mnif Sellami, Y., & Gafsi, Y. (2019). Institutional And Economic Factors Affecting The Adoption Of International Public Sector Accounting Standards. *International Journal Of Public Administration*, 42(2), 119–131. <https://doi.org/10.1080/01900692.2017.1405444>
- Mookherjee, D. (2014). Accountability Of Local And State Governments In India: An Overview Of Recent Research. *Indian Growth And Development Review*, 7(1), 12–41. <https://doi.org/10.1108/IGDR-12-2013-0049>
- Mulgan, R. (2000). 'Accountability': An Ever-Expanding Concept? *Public Administration*, 78(3), 555–573. <https://doi.org/10.1111/1467-9299.00218>

- Mutunga, D., & Owino, E. (2017). Effect Of Management Practices On The Financial Performance Of Manufacturing Firms In Kenya Dorothy Mutunga & Dr . Edward Owino Effect Of Management Practices On The Effect Of Management Practices On The Financial Performance Of Manufacturing Firms In Ken. *Journal Of Finance And Accounting*, 1(1), 1–14. <https://Erepo.Usiu.Ac.Ke/Handle/11732/4255>
- Naeem, N., Cankaya, S., & Bildik, R. (2022). Does ESG Performance Affect The Financial Performance Of Environmentally Sensitive Industries? A Comparison Between Emerging And Developed Markets. *Borsa Istanbul Review*, 22, S128–S140. <https://doi.org/10.1016/J.Bir.2022.11.014>
- Najaf, R., & Najaf, K. (2021). Political Ties And Corporate Performance: Why Efficiency Matters? *Journal Of Business And Socio-Economic Development*, 1(2), 182–196. <https://doi.org/10.1108/Jbsed-03-2021-0023>
- Nakmahachalasint, O., & Narktabtee, K. (2019). Implementation Of Accrual Accounting In Thailand's Central Government. *Public Money And Management*, 39(2), 139–147. <https://doi.org/10.1080/09540962.2018.1478516>
- Nei, K. S., Foster, J. L., Ness, A. M., & Nei, D. S. (2018). Rule Breakers And Attention Seekers: Personality Predictors Of Integrity And Accountability In Leaders. *International Journal Of Selection And Assessment*, 26(1), 17–26. <https://doi.org/10.1111/Ijsa.12201>
- Nijhof, A., Schaveling, J., & Zalesky, N. (2019). Business, Society, And The Need For Stewardship Orientation. *Journal Of Organizational Change Management*, 32(1), 145–163. <https://doi.org/10.1108/JOCM-09-2017-0348>

- Nirwana, & Haliah. (2018). Determinant Factor Of The Quality Of Financial Statements And Performance Of The Government By Adding Contextual Factors: Personal Factor, System/Administrative Dactor. *Asian Journal Of Accounting Research*, 3(1), 28–40. <https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2018-0014>
- Nitzl, C., Roldan, J. L., & Cepeda, G. (2016). Mediation Analysis In Partial Least Squares Path Modelling, Helping Researchers Discuss More Sophisticated Models. *Industrial Management And Data Systems*, 116(9), 1849–1864. <https://doi.org/10.1108/IMDS-07-2015-0302>
- Noor, J. (2015). *Analisis Data Penelitian Ekonomi Dan Manajemen*. Grasindo.
- Nurhaeda, A., & Tenriola, A. (2022). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. *Tangible Journal*, 7(2), 161–170. <https://doi.org/10.53654/Tangible.V7i2.304>
- Nurriszkiana, B., Handayani, L., & Widiastuty, E. (2017). Determinan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(1), 28–47. <https://doi.org/10.18196/Jai.18159>
- Oliveira, E., Abner, G., Lee, S., Suzuki, K., Hur, H., & Perry, J. L. (2024). What Does The Evidence Tell Us About Merit Principles And Government Performance? *Public Administration*, 102(2), 668–690. <https://doi.org/10.1111/Padm.12945>

- Orelli, R. L., Padovani, E., & Scorsone, E. A. (2011). E-Government, Accountability, And Performance: A Comparative Analysis Between European Governments. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1458494>
- Organisation For Economic Co-Operation And Development (OECD). (2005). *E-Government For Better Government*. OECD.
- Otley, D. (2001). Extending The Boundaries Of Management Accounting Research: Developing Systems For Performance Management. *British Accounting Review*, 33(3), 243–261. <https://doi.org/10.1006/bare.2001.0168>
- Pacheco, D. F., York, J. G., Dean, T. J., & Sarasvathy, S. D. (2010). The Coevolution Of Institutional Entrepreneurship: A Tale Of Two Theories. *Journal Of Management*, 36(4), 974–1010. <https://doi.org/10.1177/0149206309360280>
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency Theory: Review Of Theory And Evidence On Problems And Perspectives. *Indian Journal Of Corporate Governance*, 10(1), 74–95. <https://doi.org/10.1177/0974686217701467>
- Pandey, P., & Mishra, M. (2015). Research Methodology: Tool And Techniques. In *Bridge Center*. https://doi.org/10.1007/978-3-031-27054-3_3
- Patarai, I. (2015). *Ombudsman Dan Akuntabilitas Publik: Perspektif Daerah Istimewa Yogyakarta*. De La Macca.

- Patarai, M. I. (2017). *Kinerja Keuangan Daerah*. De La Macca. Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Republik Indonesia*, 2504, 1–9.
- Perrow, C., March, J., & Olsen, P. (1977). Ambiguity And Choice In Organizations. *Contemporary Sociology*, 6(3), 294–298.
- Phillips, R. A., Barney, J. B., Freeman, R. E., & Harrison, J. S. (2019). Stakeholder Theory. In *Coxford University Pres.* [Https://Doi.Org/10.1007/978-3-030-70428-5_1](https://doi.org/10.1007/978-3-030-70428-5_1)
- Pilcher, R. (2011). Implementing IFRS In Local Government: Institutional Isomorphism As NPM Goes Mad? *Local Government Studies*, 37(4), 367–389. [Https://Doi.Org/10.1080/03003930.2011.588702](https://doi.org/10.1080/03003930.2011.588702)
- Pilianti, N. K. D., & Rasmini, N. K. (2021). The Effect Of Community Participation, Competency Of Employees, Utilization Of Information Technology, And Internal Control Systems On Fund Accountability. *American Journal Of Humanities And Social Sciences Research*, 5(3), 361–366. [Www.Ajhssr.Com](http://www.ajhssr.com)
- Pina, V., Torres, L., & Royo, S. (2010). Is E-Government Promoting Convergence Towards More Accountable Local Governments? *International Public Management Journal*, 13(4), 350–380. [Https://Doi.Org/10.1080/10967494.2010.524834](https://doi.org/10.1080/10967494.2010.524834)
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2011). *Public Management Reform A Comparative Analysis—New Public Management, Governance, And The Neo-Weberian State*. [Http://Eprints.Unl.Mx/5481/1/1020149995.PDF](http://eprints.unl.mx/5481/1/1020149995.pdf)

- Prasetyo, B., & Susanto, T. D. (2017). The Relationship Analysis Of E-Government Implementation On Increasing Capital Investment In Region (Case Study : Banyuwangi City). *IPTEK Journal Of Engineering*, 3(1), 17–21. <https://doi.org/10.12962/joe.v3i1.2267>
- Rahayu, S. (2020). Cogent Business & Management Internal Auditors Role Indicators And Their Support Of Good Governance Internal Auditors Role Indicators And Their Support Of Good Governance. *Cogent Business & Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1751020>
- Rana, & Hoque. (2020). Institutionalising Multiple Accountability Logics In Public Services: Insights From Australia. *British Accounting Review*, 52(4), 100919. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2020.100919>
- Rana, N. P., Dwivedi, Y. K., & Williams, M. D. (2013). Analysing Challenges, Barriers And CSF Of Egov Adoption. *Transforming Government: People, Process And Policy*, 7(2), 177–198. <https://doi.org/10.1108/17506161311325350>
- Ray, S. (2012). Reinforcing Accountability In Public Services: An ICT Enabled Framework. *Transforming Government: People, Process And Policy*, 6(2), 135–148. <https://doi.org/10.1108/17506161211246890>
- Republik Indonesia. (2003). *Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*. 1–104.
- Republik Indonesia. (2020a). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia*, 53(9), 1689–1699.
- Republik Indonesia. (2020b). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian N* (Issue 1).
- Rolstadås, A. (1998). Enterprise Performance Measurement. *International Journal Of Operations & Production Management*, 18(9), 989–999. https://doi.org/10.1007/978-1-349-01255-8_6
- Romzek, & Dubnick. (1987). Accountability In The Public Sector: Lessons From The Challenger Tragedy. *Public Administration Review*, 47(3), 227–238.
- Rouault, J., & Albertini, E. (2022). Reconciling The Social Sector With External Accountability Requirements: Lessons From Stewardship Theory. *Journal Of Business Research*, 142, 485–498. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.12.082>
- Sari, F. D., Haryadi, & Arum, E. D. . (2018). Determinan Implementasi Good Governance Serta Implikasinya Pada Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi Empiris Di Kota Jambi). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 3(1), 1–15.

- Sari, N., Ghozali, I., & Achmad, T. (2017). The Effect Of Internal Audit And Internal Control System On Public Accountability: The Emperical Study. *International Journal Of Civil Engineering And Technology (IJCET)*, 8(September), 157–166.
- Sarsted, M., Ringle, C., & Hair, J. (2017). Treating Unobserved Heterogeneity In PLS-SEM: A multi-Method Approach. In *Springer International Publishing* (Issue November, Pp. 1–414). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-64069-3>
- Sarstedt, M., Ringle, C. M., Cheah, J. H., Ting, H., Moisescu, O. I., & Radomir, L. (2020). Structural Model Robustness Checks In PLS-SEM. *Tourism Economics*, 26(4), 531–554. <https://doi.org/10.1177/1354816618823921>
- Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2021). Handbook Of Market Research. In *Handbook Of Market Research* (Issue July). <https://doi.org/10.1007/978-3-319-05542-8>
- Schillemans, T., & Bjurström, K. H. (2020). Trust And Verification: Balancing Agency And Stewardship Theory In The Governance Of Agencies. *International Public Management Journal*, 23(5), 650–676. <https://doi.org/10.1080/10967494.2018.1553807>
- Schons, L., & Steinmeier, M. (2016). Walk The Talk? How Symbolic And Substantive CSR Actions Affect Firm Performance Depending On Stakeholder Proximity. *Corporate Social Responsibility And Environmental Management*, 23(6), 358–372. <https://doi.org/10.1002/Csr.1381>

- Sciulli, N. (2017). Making A Splash: Local Council Accountability Implications For A Proposed Aquatic And Health Centre. *Pacific Accounting Review*, 29(4), 534–550. <https://doi.org/10.1108/PAR-10-2016-0092>
- Scott, W. R. (1987). The Adolescence Of Institutional Theory. *Administrative Science Quarterly*, 32(4), 493. <https://doi.org/10.2307/2392880>
- Scott, W. R., Smith, K. G., & Hitt, M. A. (2005). Institutional Theory: Contributing To A Theoretical Research Program Chapter Prepared For Great Minds In Management: The Process Of Theory. *Great Minds In Management: The Process Of Theory Development*, February, 460–485.
- Setiaman, S. (2020). *Tutorial Analisa Parsial Model Persamaan Struktural Dengan Software SMART-PLS Versi 3*. PPNI Qatar.
- Shadiqiawan, R. M. R., & Mulyani, S. (2020). The Quality Of Local Government Financial Statements And The Use Of Financial Information In Decision Making. *Journal Of Accounting Auditing And Business*, 3(1), 73–81. <https://doi.org/10.24198/Jaab.V3i1.25605>
- Siriwardhane, P., & Taylor, D. (2017). Perceived Accountability For Local Government Infrastructure Assets: The Influence Of Stakeholders. *Pacific Accounting Review*, 29(4), 551–572. <https://doi.org/10.1108/PAR-11-2016-0110>
- Sofyani, H., & Akbar, R. (2015). Hubungan Karakteristik Pegawai Pemerintah Daerah Dan Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja: Perspektif Ismorfisma Institusional. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 153–173. <https://doi.org/10.20885/Jaai.Vol19.Iss2.Art6>

- Sofyani, H., Akbar, R., & Ferrer, R. C. (2018). 20 Years Of Performance Measurement System (PMS) Implementation In Indonesian Local Governments: Why Is Their Performance Still Poor? *Asian Journal Of Business And Accounting*, 11(1), 151–184. <https://doi.org/10.22452/Ajba.Vol11no1.6>
- Sofyani, H., Riyadh, H. A., & Fahlevi, H. (2020). Improving Service Quality, Accountability And Transparency Of Local Government: The Intervening Role Of Information Technology Governance. *Cogent Business And Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1735690>
- Song, S., Van Hoof, H. B., & Park, S. (2017). The Impact Of Board Composition On Firm Performance In The Restaurant Industry: A Stewardship Theory Perspective. *International Journal Of Contemporary Hospitality Management*, 29(8), 2121–2138.
- Sovacool, B. K., Axsen, J., & Sorrell, S. (2018). Promoting Novelty, Rigor, And Style In Energy Social Science: Towards Codes Of Practice For Appropriate Methods And Research Design. *Energy Research And Social Science*, 45(July 2018), 12–42. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2018.07.007>
- Spence, M. A. (1973). Job Market Signaling. *Quarterly Journal Of Economics*, 87(3), 355–374.
- Steets, J. (2010). *Accountability In Public Policy Partnerships*. Palgrave Macmillan.
- Subramanian, S. (2018). Stewardship Theory Of Corporate Governance And Value System: The Case Of A Family-Owned Business Group In India. *Indian Journal Of Corporate Governance*, 11(1), 88–102. <https://doi.org/10.1177/0974686218776026>

- Sukimon, I. L., Salju, S., & Anwar, S. M. (2021). The Effect Of Financial Report Quality And Human Resource Auditor Competence On The Implementation Of SAKIP (Government Agencies Performance Accountability System). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Universitas Muhammadiyah Polopo, Polopo*, 29, 3742–3751. [Http://Www.Bircu-Journal.Com/Index.Php/Birci/Article/View/2141](http://Www.Bircu-Journal.Com/Index.Php/Birci/Article/View/2141)
- Sumaryati, A., Novitasari, E. P., & Machmuddah, Z. (2020). *Accounting Information System , Internal Control System , Human Resource Competency And Quality Of Local Government Financial Statements In Indonesia*. 7(10), 795–802. <https://doi.org/10.13106/Jafeb.2020.Vol7.N10.795>
- Sutopo, B., Wulandari, T. R., Adiati, A. K., & Saputra, D. A. (2017). E-Government, Audit Opinion, And Performance Of Local Government Administration In Indonesia. *Australasian Accounting, Business And Finance Journal*, 11(4), 6–22. <https://doi.org/10.14453/Aabfj.V11i4.2>
- Svensson, G., Ferro, C., Høgevold, N., Padin, C., Carlos Sosa Varela, J., & Sarstedt, M. (2018). Framing The Triple Bottom Line Approach: Direct And Mediation Effects Between Economic, Social And Environmental Elements. *Journal Of Cleaner Production*, 197, 972–991. <https://doi.org/10.1016/J.Jclepro.2018.06.226>
- Tang, H. (2022). The Effet Of ESG Performance On Corporate Innovation In China: The Mediating Role Of Financial Constraints And Agency Cost. *Sustainability*, 14(3769), 1–21.

- Tran, Y. T., Nguyen, N. P., & Hoang, T. C. (2021). The Role Of Accountability In Determining The Relationship Between Financial Reporting Quality And The Performance Of Public Organizations: Evidence From Vietnam. *Journal Of Accounting And Public Policy*, 40(1), 106801. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2020.106801>
- Tseng, J. J., & Chou, P. H. (2011). Mimetic Isomorphism And Its Effect On Merger And Acquisition Activities In Taiwanese Financial Industries. *Service Industries Journal*, 31(9), 1451–1469. <https://doi.org/10.1080/02642060903580573>
- Tshipa, J., Brummer, L. M., Wolmarans, H., & Du Toit, E. (2018). The Effect Of Industry Nuances On The Relationship Between Corporate Governance And Financial Performance: Evidence From South African Listed Companies. *South African Journal Of Economic And Management Sciences*, 21(1), 1–18. <https://doi.org/10.4102/Sajems.V21i1.1964>
- Tumwebaze, Z., Mukyala, V., Ssekiziyivu, B., Tirisa, C. B., & Tumwebonire, A. (2018). Corporate Governance, Internal Audit Function And Accountability In Statutory Corporations. *Cogent Business And Management*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1527054>
- United Nations. (2020). E-Government Survey 2020 - Digital Government In The Decade Of Action For Sustainable Development. In *United Nations E-Government Surveys*.
- Van Heerden, M., & Steyn, S. (2012). Mechanisms To Improve Accountability In The Public Sector. *Mediterranean Journal Of Social Sciences*, 3(12), 75–89. <https://doi.org/10.5901/Mjss.2012.V3n12p75>

- Velayutham, A., Rahman, A. R., Narayan, A., & Wang, M. (2021). Pandemic Turned Into Pandemonium: The Effect On Supply Chains And The Role Of Accounting Information. *Accounting, Auditing And Accountability Journal*, 34(6), 1404–1415. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2020-4800>
- Verbeeten, F. H. M., & Speklé, R. F. (2015). Management Control, Results-Oriented Culture And Public Sector Performance: Empirical Evidence On New Public Management. *Organization Studies*, 36(7), 953–978. <https://doi.org/10.1177/0170840615580014>
- Veronica, M., Juma, B., Maureen, B., Zainabu, T., & Lasuli, B. (2017). Accountability Of Local Government Authorities: A Developing Economy Perspective. *African Journal Of Business Management*, 11(12), 266–274. <https://doi.org/10.5897/Ajbm2017.8326>
- Vigoda, E. (2002). From Responsiveness To Collaboration: Governance, Citizens, And The Next Generation Of Public Administration. *Public Administration Review*, 62(5), 527–540. <https://doi.org/10.1111/1540-6210.00235>
- Vitolla, F., Raimo, N., & Rubino, M. (2020). Board Characteristics And Integrated Reporting Quality: An Agency Theory Perspective. *Corporate Social Responsibility And Environmental Management*, 27(2), 1152–1163. <https://doi.org/10.1002/Csr.1879>
- Vo, L. C., Culié, J. D., & Mounoud, E. (2016). Microfoundations Of Decoupling: From A Coping Theory Perspective. *Management (France)*, 19(4), 248–276. <https://doi.org/10.3917/Mana.194.0248>

- W. Wirtz, B., & Daiser, P. (2018). E-Government. In *Handbuch Staat Springer*. <https://doi.org/10.4018/Jdsst.2010100101>
- Waheed, A., & Zhang, Q. (2022). Effect Of CSR And Ethical Practices On Sustainable Competitive Performance: A Case Of Emerging Markets From Stakeholder Theory Perspective. *Journal Of Business Ethics*, 175(4), 837–855. <https://doi.org/10.1007/S10551-020-04679-Y>
- Wang, C., Medaglia, R., & Zheng, L. (2018). Towards A Typology Of Adaptive Governance In The Digital Government Context: The Role Of Decision-Making And Accountability. *Government Information Quarterly*, 35(2), 306–322. <https://doi.org/10.1016/J.Giq.2017.08.003>
- Wang, S., Wang, H., Wang, J., & Yang, F. (2020). Does Environmental Information Disclosure Contribute To Improve Firm Financial Performance? An Examination Of The Underlying Mechanism. *Science Of The Total Environment*, 714(96), 136855. <https://doi.org/10.1016/J.Scitotenv.2020.136855>
- Wardani, D. K., Prabowo, A. A., & Anugrah, K. A. (2022). Pengaruh Komitmen Organisasi Perangkat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Whistleblowing System Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Seluruh Kelurahan Di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal). *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 6(2), 13–28. <https://doi.org/10.52447/Jam.V6i2.5562>
- Wholey, J. S. (1996). Formative And Summative Evaluation: Related Issues In Performance Measurement. *American Journal Of Evaluation*, 17(2), 145–149. <https://doi.org/10.1177/109821409601700206>

- Widyaningsih, A. (2015a). The Influence Of Internal Control System On The Financial Accountability Of Elementary Schools In Bandung, Indonesia. *Research Journal Of Finance And Accounting Wwww .Iiste*, 6(24),8996.https://www.researchgate.net/profile/Aristanti_Widyaningsih/publication/290264043_The_Influence_Of_Internal_Control_System_On_The_Financial_Accountability_Of_Elementary_Schools_In_Bandung_Indonesia/links/5695d58308ae820ff074e64d/The-Influence-Of-Internal-
- Widyaningsih, A. (2015b). The Influence Of Internal Control System On The Financial Accountability Of Elementary Schools In Bandung, Indonesia. *Research Journal Of Finance And Accounting Wwww . Iiste*, 6(24), 89–96.
- Yigitcanlar, T., Kankanamge, N., Butler, L., Vella, K., & Desouza, K. C. (2020). *Smart Cites Down Under: Performance Of Australian Local Government Areas* (Issue February).
- Yulisa, F., Ratnawati, V., & Taufik, T. (2020). The Factors Affecting Regional Financial Accountability: Organizational Commitment As Moderating Variables (Study On Rokan Hilir District Government OPD). *International Journal Of Economics, Business And Applications*, 4 (2),61-73.<https://ijeba.ejournal.unri.ac.id/index.php/IJEBA/article/view/7659>
- Zajac, E. J., & Goranova, M. (2024). When The Principal Is The Firm's Problem: Principal Costs And Their Corporate Governance Implications. *Academy Of Management Review*, July. <https://doi.org/10.5465/Amr.2022.0479>

- Zhang, Q., Cao, M., Zhang, F., Liu, J., & Li, X. (2020). Effects Of Corporate Social Responsibility On Customer Satisfaction And Organizational Attractiveness: A Signaling Perspective. *Business Ethics*, 29(1), 20–34. <https://doi.org/10.1111/Beer.12243>
- Zubaidah, A. N., & Nugraeni. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Slemen. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 978–988. <https://doi.org/10.31955/Mea.V7i3.3475>
- Zulfaidah, Z., Bachtiar, I. H., & Nursyam, N. (2020). Utilization Of Information Technology And Internal Control Systems On Accountability Of Procurement Of Goods And Government Services. *Business And Entrepreneurial Review*, 20(1), 67–78. <https://doi.org/10.25105/Ber.V20i1.6942>

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Sukhemi, S.E., M.Sc., lahir desa Kertasinduyasa, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Ia adalah analis tata kelola keuangan sektor publik dan Dosen di Universitas PGRI Yogyakarta (UPY). Riwayat Pendidikan Sarjana (S.E) diperolehnya di STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, tahun 1994-1998, bidang Ilmu Akuntansi. Melanjutkan ke jenjang S2 di Universitas Gadjah Mada (UGM), tahun 2007-2009, bidang Ilmu Akuntansi (M.Sc.). Melanjutkan jenjang Studi Doktorat (Dr.) di Universitas Islam Indonesia (UII), Bidang Ilmu Akuntansi, tahun 2018-2025. Selain aktif mengajar penulis menjabat wakil rektor bidang II periode 2021-2025 di Universitas PGRI Yogyakarta (UPY). Beragam karya telah dipublikasikan penulis di jurnal-jurnal ilmiah dan aktif memberikan pelatihan perihal tata kelola keuangan di sektor publik.



Prof. Drs. Hadri Kusuma, MBA., DBA., adalah dosen tetap di Prodi Akuntansi UII pada tahun 1988. Ia menempuh Pendidikan Drs (*Bachelor in Accounting*) di Universitas Gajah Mada. Pendidikan MBA (*Master of Business Administration*) di Murray State University, Amerika Serikat, dan pendidikan DBA (*Doctor of Business Administration*) di Victoria University of Technology, Australia. Saat ini, Penulis adalah Guru Besar di Prodi Akuntansi. Selain aktif mengajar, ia juga menjabat sebagai Chair of the University Senate, Universitas Islam Indonesia (2018-present). Chair of the Faculty Senate, Faculty of Business and Economics, Universitas Islam Indonesia (2018-present). Dean, Faculty of Business and Economics, Universitas Islam Indonesia (2010-2014).



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS. menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi (*Bachelor of Accounting*) di bidang akuntansi di Universitas Islam Indonesia. Pendidikan Magister Sains (*Master of Science in Accounting*) ditempuhnya di Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 2014, penulis menyelesaikan program Doktor PhD (*Doctor of Accounting*) bidang Akuntansi dari Curtin University di Perth, Western Australia. Saat ini menjabat sebagai Dean, Faculty of Business and Economics, Universitas Islam Indonesia (2022-present), Head of Department of Accounting, Faculty of Business and Economics, Universitas Islam Indonesia (2018-2022), Coordinator of Master Program in Accounting, Faculty of Business and Economics, Universitas Islam Indonesia (2016-2018), Director, PT Global Prima Utama – UIINet (2006-2009).



Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak., CMA., CA. menyelesaikan pendidikan S1 sebagai Sarjana Akuntansi (SE) di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2000, kemudian ia juga menyelesaikan pendidikan Magister Sains Akuntansi S2 (M.Si) dan Doktor di bidang Akuntansi (S3) di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 2003 dan 2017. Bidang konsentrasi ilmu yang ia tekuni adalah Akuntansi Pemerintahan dan Sektor Publik. Pernah menjadi Head of Undergraduate Program in Accounting, Faculty of Business and Economics, Universitas Islam Indonesia (2018 – 2022)